

**STRATEGI PENINGKATAN INDEKS PENDIDIKAN SEBAGAI
LOKOMOTIF PENDORONG PENINGKATAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR**

STRATEGY FOR THE EDUCATION INDEX IMPROVEMENT
AS A LOCOMOTIVE OF THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX
IMPROVEMENT IN SELAYAR ISLAND REGENCY

Disusun dan diajukan oleh

**JALIL SETIAWAN JAMAL
P022191021**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
WILAYAH/MANAJEMEN PERENCANAAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

**STRATEGI PENINGKATAN INDEKS PENDIDIKAN SEBAGAI
LOKOMOTIF PENDORONG PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah/Manajemen Perencanaan

Disusun dan Diajukan Oleh

JALIL SETIAWAN JAMAL

Kepada

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

STRATEGI PENINGKATAN INDEKS PENDIDIKAN SEBAGAI LOKOMOTIF PENDORONG PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disusun dan diajukan oleh:

JALIL SETIAWAN JAMAL

Nomor Pokok : P022191021

Telah di pertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Pada tanggal 4 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi Syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Ir. Muslim Salam, M.Ec
NIP.19680616 199203 1 002



Dr. A. Nixia Tenriawaru, SP., M.Si.
NIP.19721107 199702 2 001

Ketua Program Studi.
Perencanaan dan Pengembangan
Wilayah,



Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng
NIP.19620727 198903 1 003

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc
NIP.19670308 199003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Jalil Setiawan Jamal
NIM : P022191021
Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah/
Manajemen Perencanaan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Agustus 2021

Yang membuat Pernyataan



JALIL SETIAWAN JAMAL

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas karunia rahmat dan berkat-Nya, maka tesis dengan judul “Strategi Peningkatan Indeks Pendidikan sebagai Lokomotif Pendorong Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar” dapat diselesaikan. Tesis ini merupakan salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan S2 Program Manajemen Perencanaan, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Universitas Hasanuddin.

Tesis ini dapat diselesaikan berkat bimbingan dan arahan dari komisi pembimbing. Oleh karena itu pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Muslim Salam, M.Ec., selaku ketua komisi pembimbing dan Dr. A. Nixia Tenriawaru, SP., M.Si., selaku anggota komisi pembimbing. Ucapan terima kasih kami disampaikan juga kepada komisi penilai yakni Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, M.S., Dr. Muh. Hatta Jamil, S.P., M.Si dan Dr. Ir. Saadah, M.Si.

Pada kesempatan ini juga, dengan penuh rasa syukur diucapkan penuh rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Orangtua saya, Ayahanda Jamaluddin Efendi, S.Ag., M.Si. dan Ibunda Sitti Aisyah DJ., serta Ayahanda Ansar dan Ibunda Fatmawati. Tak lupa ucapan terima kasih atas dukungan yang senantiasa diberikan oleh adik tersayang, Dwi Rezki Aprilia Jamal. Terkhusus dengan penuh cinta diucapkan syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada istri tercinta Arini Ansar, anakku Raisya Adzkiyah Jalil yang selalu memberikan doa dan dukungan agar dapat menyelesaikan studi dengan baik

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Basli Ali dan Bapak Drs. H. Basok Lewa selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tempat penulis bekerja.
3. Pusbindiklatren Bappenas selaku penyedia beasiswa yang telah membiayai studi penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng selaku Ketua Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing, mendidik serta memberikan nasihat selama proses perkuliahan.
6. Segenap staf akademik Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin terkhusus kepada kak Umy Rahmi yang senantiasa memberikan bantuan dalam proses administrasi.
7. Sahabat-sahabat PPW/Manajemen Perencanaan angkatan 2019 yang telah bersama-sama berjuang selama di perkuliahan yaitu Rhonal, Dharma, Kiko, Widi, Anugrah, Arief, Ariesta, Annur, Rosma, Rini, Yuda, Dian, Rusliah dan Syamsidar.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna dengan segala kerendahan hati diharapkan masukan, kritikan, dan saran agar tulisan ini dapat disempurnakan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga karya ini bermanfaat bagi pemerintah serta masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terkhusus bagi peningkatan IPM, dunia ilmu pengetahuan dan pihak lain yang membutuhkan.

Makassar, Juli 2021

Penulis

Jalil Setiawan Jamal

ABSTRAK

JALIL SETIAWAN JAMAL. *Strategi Peningkatan Indeks Pendidikan sebagai Lokomotif Pendorong Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar* (dibimbing oleh **Muslim Salam** dan **A. Nixia Tenriawaru**)

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan terhadap beberapa indikator pendidikan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pendidikan dan merumuskan strategi peningkatan Indeks Pendidikan di wilayah daratan dan wilayah kepulauan pada Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penelitian ini menggunakan aplikasi GIS untuk melakukan pemetaan dan menggunakan analisis regresi terhadap data sekunder berbentuk data panel berupa data *time series* dari tahun 2014 sampai dengan 2019 dan data *cross section* dari 11 kecamatan untuk mengukur faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pendidikan serta teknik *Force Field Analysis* untuk merumuskan strategi peningkatan Indeks Pendidikan.

Hasil Penelitian menunjukkan sebagian besar indikator yang dipetakan memiliki capaian pada wilayah kepulauan yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada wilayah daratan. Selanjutnya, Rasio Guru Siswa SD berpengaruh negatif terhadap Indeks Pendidikan dan Rasio Kelas Siswa SD berpengaruh positif terhadap Indeks Pendidikan. Strategi prioritas peningkatan Indeks Pendidikan di wilayah daratan Kepulauan Selayar adalah (1) peningkatan jumlah dan penyerapan anggaran pendidikan, (2) penyusunan roadmap kebutuhan guru non ASN, (3) pengurangan jumlah guru non ASN. Sedangkan strategi di wilayah kepulauan adalah (1) peningkatan jumlah dan penyerapan anggaran pendidikan, (2) pemerataan guru PNS di kepulauan, (3) membangun komitmen melarang perpindahan guru PNS dari wilayah kepulauan, (4) mengusulkan formasi CPNS pada sekolah di kepulauan, dan (5) menyediakan perumahan dan insentif khusus bagi guru di kepulauan.

Kata Kunci: Indeks Pendidikan; Rasio Guru dan Siswa; Rasio Sekolah dan Siswa; Rasio Kelas dan Siswa; *Force Field Analysis*, Strategi

ABSTRACT

JALIL SETIAWAN JAMAL. *Strategy for The Education Index Improvement as a Locomotive of The Human Development Index Improvement in Selayar Island Regency* (supervised by **Muslim Salam** and **A. Nixia Tenriawaru**)

This study aims to mapping of some educational indicators, analyze factors that affect the education index, and formulate the strategies for improve the education index in the mainland and the island regions.

This study uses a GIS application to map, regression analysis of panel data which combination of time series data from 2014 to 2019 and cross section data from 11 sub-districts to analyze factors that affect the Education Index and Force Field Analysis to formulate Education Index improvement strategy.

The results showed that most of the indicators mapped have lower achievements in island region compared to mainland region. Furthermore, the teacher to student ratio at elementary school had a negative effect on the education index and the class to student ratio at elementary school had a positive effect on the education index. The priority strategies for improve the Education Index in the mainland region are (1) increase the number and absorption of the education budget, (2) preparing a roadmap for the needs of non-civil servant teachers, (3) reducing the number of non-civil servant teachers. Meanwhile, the strategies for the island region are (1) increase the number and absorption of the education budget, (2) equalization distribution of civil servant teachers, (3) building a commitment to prohibit the movement of civil servant teachers from the island region, (4) proposing the formation of candidate civil servant in schools of the island region, and (5) providing housing and special incentives for teachers.

Keywords: Education Index; Teacher to Student Ratio; School to Student Ratio; Class to Student Ratio; *Force Field Analysis*, Strategy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pendidikan	10
1. Pengertian Pendidikan	10
2. Pendidikan sebagai Sistem	11
3. Tingkatan Pendidikan	12
B. Indikator Pendidikan	14
C. Program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bidang Pendidikan	16
1. Tujuan	16
2. Sasaran	17

3. Sasaran Strategis Pelaksanaan urusan Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar	18
D. Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	19
E. Pembangunan Manusia	23
F. Indeks Pembangunan Manusia.....	25
G. Indeks Pendidikan.....	30
H. Manajemen Strategis	31
I. Penelitian Terdahulu	32
J. Hipotesis Penelitian.....	34
K. Kerangka Konseptual.....	35
BAB III. METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis dan Desain Penelitian.....	36
B. Variabel Penelitian	36
C. Definisi Operasional Variabel.....	38
D. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	39
E. Jenis dan Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
1. Pengumpulan data primer.....	43
2. Pengumpulan data sekunder	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
1. Membuat pemetaan terhadap faktor-faktor sektor pendidikan pada wilayah daratan dan wilayah kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar.....	46
2. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar	47
2.1. Estimasi Model Regresi Data Panel	47
a. <i>Common Effect Model</i> (CEM).....	47
b. <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	48

c. <i>Random Effect Model (REM)</i>	48
2.2. Pemilihan Model Regresi Data Panel Terbaik	48
a. Uji Chow.....	49
b. Uji Hausmann.....	49
2.3. Uji asumsi Klasik	50
2.4. Interpretasi Model Regresi Data Panel	51
2.5. Uji Hipotesis.....	53
3. Merumuskan strategi peningkatan indeks pendidikan sebagai lokomotif peningkatan IPM Kabupaten Kepulauan Selayar	55
H. Matriks Penelitian.....	61
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Selayar	65
1. Aspek Geografis dan Demografis	65
1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	65
1.2 Aspek Demografi	67
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	71
2.1 Pertumbuhan Ekonomi	71
2.2 Produk Domestik Regional Bruto.....	72
2.3 Laju Inflasi	75
2.4 Pendapatan Perkapita	76
2.5 Indeks Gini.....	77
2.6 Persentase Penduduk Miskin	78
B. Capaian IPM dan Indeks Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	79
C. Kondisi Eksisting Capaian Pembangunan Sektor Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	83
D. Pemetaan Indikator Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar.....	96

1. Pemetaan Rasio Guru terhadap Siswa (RGS).....	97
2. Pemetaan Rasio Sekolah terhadap Siswa (RSKS).....	101
3. Pemetaan Rasio Kelas terhadap Siswa (RKS)	105
E. Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar	108
1. Estimasi Model Regresi Panel	108
1.1 Hasil Estimasi dengan <i>Common Effect Model</i> (CEM)	108
1.2 Hasil Estimasi dengan <i>Fixed Effect Model</i> (CEM)	109
1.3 Hasil Estimasi dengan <i>Random Effect Model</i>	110
2. Pemilihan Model Regresi Data Panel Terbaik	111
2.1 Uji <i>Chow</i>	112
2.2 Uji <i>Hausman</i>	112
3. Interpretasi Model Regresi Data Panel	113
4. Uji Hipotesis.....	116
4.1 Uji Statistik F dan Koefisien Determinasi R^2	116
4.2 Uji Statistik t.....	117
4.3 Faktor-faktor sektor pendidikan yang berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pendidikan.....	119
F. Strategi peningkatan Indeks Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	124
1. Menentukan target dan tujuan	124
2. Mengidentifikasi kekuatan pendorong dan penghambat... ..	124
3. Pemilihan Kekuatan Kunci atau Prioritas Perencanaan....	127
4. Penentuan Strategi	133
4.1 Strategi peningkatan Indeks Pendidikan di wilayah daratan	133
4.2 Strategi peningkatan Indeks Pendidikan di wilayah kepulauan.....	135

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	142

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator SPM bidang Pendidikan	21
Tabel 2. Perbandingan IPM Metode Baru dan Metode Lama	28
Tabel 3. Penentuan nilai maksimum dan minimum penghitungan IPM....	29
Tabel 4. Jenis dan sumber data pertahapan penelitian	40
Tabel 5. Penentuan Informan Penelitian	44
Tabel 6. Tahapan pengambilan data primer	44
Tabel 7. Faktor dan variabel pendorong (D) dan penghambat (H).....	57
Tabel 8. Skala Penilaian Faktor Pendorong.....	57
Tabel 9. Skala Penilaian Faktor Penghambat	58
Tabel 10. Kekuatan Relatif Penghambat	58
Tabel 11. Kekuatan Relatif Pendorong	59
Tabel 12. Matrik Penelitian : Strategi Peningkatan Indeks Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	62
Tabel 13. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar ...	66
Tabel 14. Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 – 2019.....	68
Tabel 15. Rata-Rata Penduduk Per Desa, Kepadatan dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Di Kabupaten Kepulauan Selayar 5 Tahun Terakhir.....	69
Tabel 16. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2019.....	70
Tabel 17. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Sex Ratio di Kabupaten Kepulauan Selayar 2015 - 2019	71
Tabel 18. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2019.....	71
Tabel 19. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2015-2019.....	73
Tabel 20. Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2019	74

Tabel 21. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2015-2019	74
Tabel 22. Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2019.....	76
Tabel 23. Perkembangan Laju Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2019	76
Tabel 24. Perkembangan PDRB/Kapita (ADHB) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2019.....	77
Tabel 25. Indeks Gini Ratio Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2019	78
Tabel 26. Persentase Penduduk Miskin Kepulauan Selayar Tahun 2015-2019	78
Tabel 27. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2019.....	78
Tabel 28. Capaian Indeks Pendidikan setiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2014 - 2019.....	82
Tabel 29. Hasil Estimasi <i>Common Effect Model</i>	109
Tabel 30. Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	110
Tabel 31. Hasil Estimasi <i>Random Effect Model</i>	111
Tabel 32. Hasil Uji Chow	112
Tabel 33. Hasil Uji <i>Hausman</i>	113
Tabel 34. Hasil Regresi Data Panel Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pendidikan.....	114
Tabel 35. Hasil uji F dan R ² Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pendidikan.....	116
Tabel 36. Hasil uji t Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pendidikan	117
Tabel 37. Faktor Pendorong dan Penghambat Dalam Rangka Peningkatan Indeks Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar pada wilayah daratan	125
Tabel 38. Faktor Pendorong dan Penghambat Dalam Rangka Peningkatan Indeks Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar pada wilayah Kepulauan	126

Tabel 39. Penentuan Prioritas Perencanaan dari Faktor Penghambat Peningkatan Indeks Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar Wilayah Daratan.....	127
Tabel 40. Penentuan Prioritas Perencanaan dari Faktor Pendorong Peningkatan Indeks Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar Wilayah Daratan.....	128
Tabel 41. Penentuan Prioritas Perencanaan dari Faktor Penghambat Peningkatan Indeks Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar Wilayah Kepulauan	129
Tabel 42. Penentuan Prioritas Perencanaan dari Faktor Pendorong Peningkatan Indeks Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar Wilayah Kepulauan	131

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perkembangan IPM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2008 - 2019	2
Grafik 2. Perkembangan Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2008 – 2019	3
Grafik 3. Perkembangan Pengeluaran perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2008 -2018	3
Grafik 4. Pencapaian Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2008-2019 ..	4
Grafik 5. Perbandingan pendapatan per kapita (dalam ratusan ribu) dan Indeks Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2014 – 2019	5
Grafik 6. Capaian IPM 24 Kabupaten/ Kota di provinsi Sulsel Tahun 2019	6
Grafik 7. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2008 – 2019	79
Grafik 8. IPM Kabupaten/Kota dan IPM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019	80
Grafik 9. Capaian Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2008 – 2019	81
Grafik 10. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2008 – 2019	84
Grafik 11. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2008 – 2019	85
Grafik 12. Angka Kelulusan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015 – 2019	86
Grafik 13. Angka Putus Sekolah SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015 – 2019	87
Grafik 14. Angka Partisipasi Sekolah tingkat SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2008 – 2019	89
Grafik 15. Angka Melanjutkan Pendidikan dari SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 – 2019.....	89
Grafik 16. Angka Melek Huruf Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 – 2019	90
Grafik 17. Rasio Ruang Kelas terhadap Siswa Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2008 – 2019	92
Grafik 18. Kondisi Ruang Kelas SD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015 - 2019	92

Grafik 19. Kondisi Ruang Kelas SMP Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015 - 2019	93
Grafik 20. Rasio Sekolah terhadap Siswa Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2008 – 2019	94
Grafik 21. Rasio Guru terhadap Siswa Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2008 – 2019	95
Grafik 22. Persentase sekolah dengan kondisi bangunan baik tingkat SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 – 2019	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar	67
Gambar 2. Peta Rasio Guru terhadap Siswa tingkat SD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2008.....	98
Gambar 3. Peta Rasio Guru terhadap Siswa tingkat SD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019.....	98
Gambar 4. Peta Rasio Guru terhadap Siswa tingkat SMP Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2008.....	99
Gambar 5. Peta Rasio Guru terhadap Siswa tingkat SMP Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019.....	99
Gambar 6. Peta Rasio Sekolah terhadap Siswa tingkat SD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2008.....	102
Gambar 7. Peta Rasio Sekolah terhadap Siswa tingkat SD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019.....	102
Gambar 8. Peta Rasio Sekolah terhadap Siswa tingkat SMP Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2008.....	103
Gambar 9. Peta Rasio Sekolah terhadap Siswa tingkat SMP Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019.....	103
Gambar 10. Peta Rasio Kelas terhadap Siswa tingkat SD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2008.....	105
Gambar 11. Peta Rasio Kelas terhadap Siswa tingkat SD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019.....	106
Gambar 12. Peta Rasio Kelas terhadap Siswa tingkat SMP Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2008.....	106
Gambar 13. Peta Rasio Kelas terhadap Siswa tingkat SMP Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019.....	107
Gambar 14. Jumlah Guru Menurut Usia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

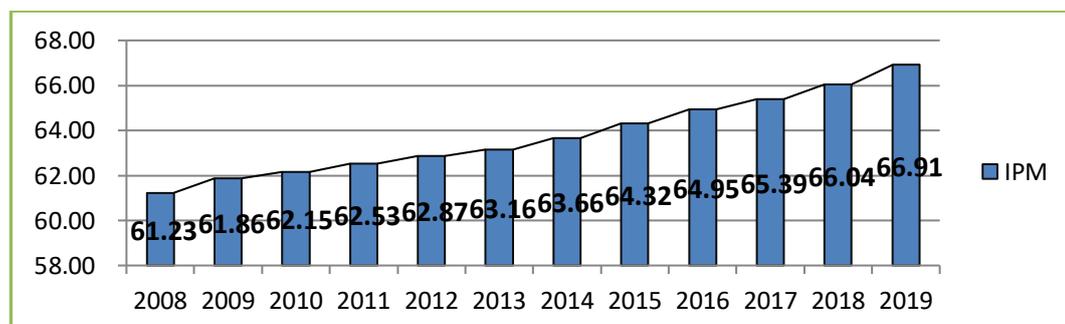
Pembangunan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kualitas hidup masyarakat pada suatu daerah atau negara melalui pelaksanaan program dan kegiatan oleh daerah/negara dimaksud. (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2011). Keberhasilan pembangunan suatu wilayah diukur dengan beberapa parameter, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) (Maulana & Bowo, 2013).

Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu faktor keberhasilan pemerintahan suatu daerah sangat erat kaitannya dengan pelayanan dasar yang mampu dihadirkan dan dikembangkan oleh daerah dimaksud. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli.

Sejalan dengan hal tersebut, pada rumusan Visi Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu "Terwujudnya Masyarakat Maritim yang sejahtera

berbasis nilai keagamaan dan kultural”, menyatakan bahwa seluruh komponen di Kabupaten Kepulauan Selayar baik Pemerintah maupun masyarakat memiliki satu tujuan yang sama yaitu masyarakat maritim yang sejahtera. Untuk mencapai masyarakat maritim yang sejahtera, maka pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar telah dirumuskan beberapa indikator kinerja sasaran yang merupakan tolok ukur terhadap pencapaian masyarakat maritim yang sejahtera dimaksud. Salah satu diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Selayar memang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 seperti yang digambarkan pada grafik dibawah ini :

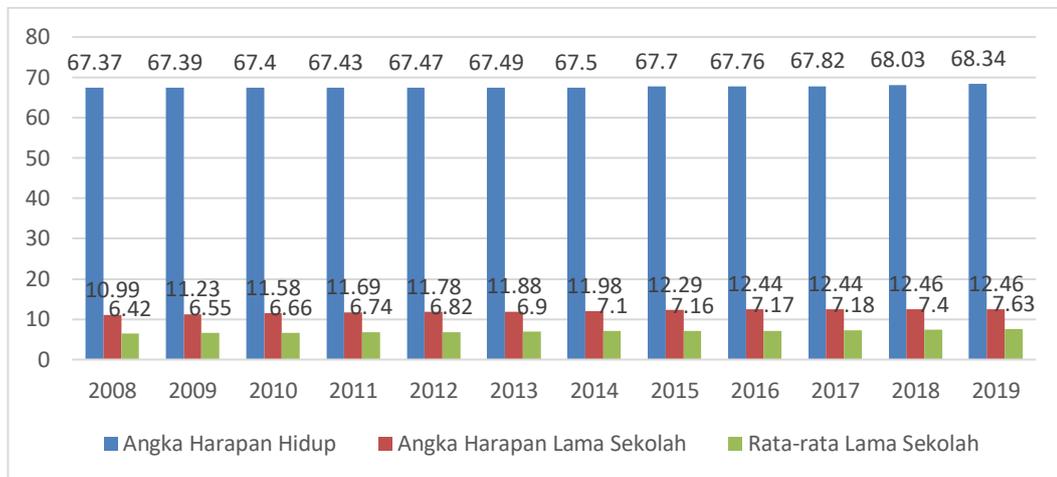


Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 1. Perkembangan IPM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2008 - 2019

Jika dilihat dari perkembangan pencapaian dari tiga komponen Indeks Pembangunan Manusia yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten

Kepulauan Selayar juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 2. Perkembangan Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2008 – 2019

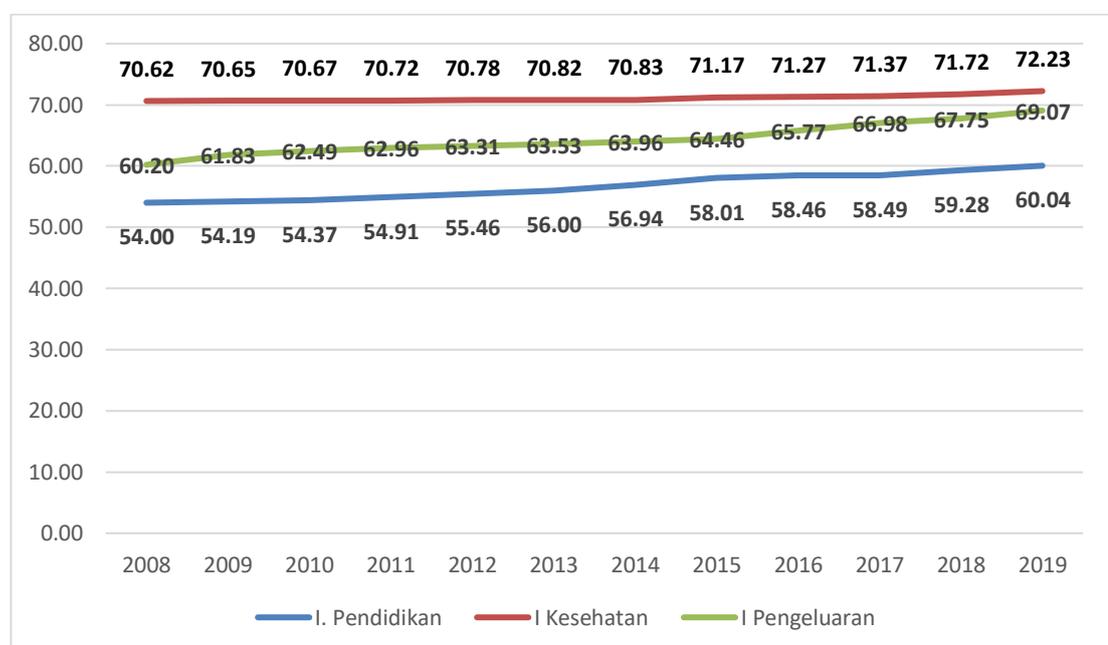


Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 3. Perkembangan Pengeluaran perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2008 -2018

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan indikator Pengeluaran perkapita cenderung meningkat. Namun, jika dilihat dari perkembangan indikator Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah serta Angka rata-rata lama sekolah, maka pencapaian indikator dimaksud cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Terkhusus untuk

pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah yang merupakan cerminan dari pencapaian kinerja sektor pendidikan, maka dapat dilihat bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum mampu meningkatkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia secara optimal. Hal ini juga dapat dilihat dari pencapaian indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks pengeluaran yang merupakan tiga komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, sebagaimana yang tertuang pada grafik di bawah ini:



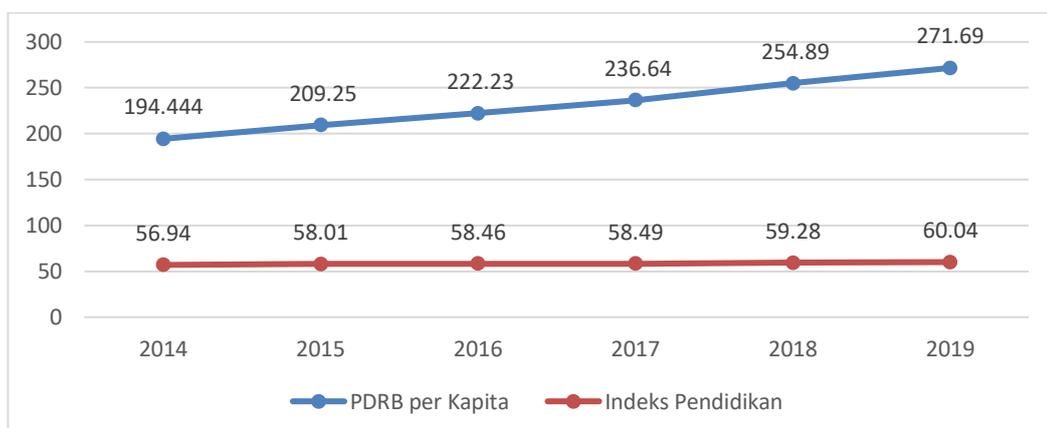
Sumber : Diolah dari data Badan Pusat Statistik

Grafik 4. Pencapaian Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2008-2019

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian indeks Pendidikan merupakan pencapaian terendah jika dibandingkan dengan pencapaian indeks kesehatan dan indeks pengeluaran. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja dan kontribusi sektor pendidikan untuk pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak optimal jika

dibandingkan dengan sektor kesehatan dan sektor pengeluaran. Jika dilihat dari pembagian kategori tingkat capaian IPM oleh BPS, maka indeks pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah satu-satunya indeks komposit dari IPM yang berkategori rendah karena termasuk pada katogori kurang dari 60.

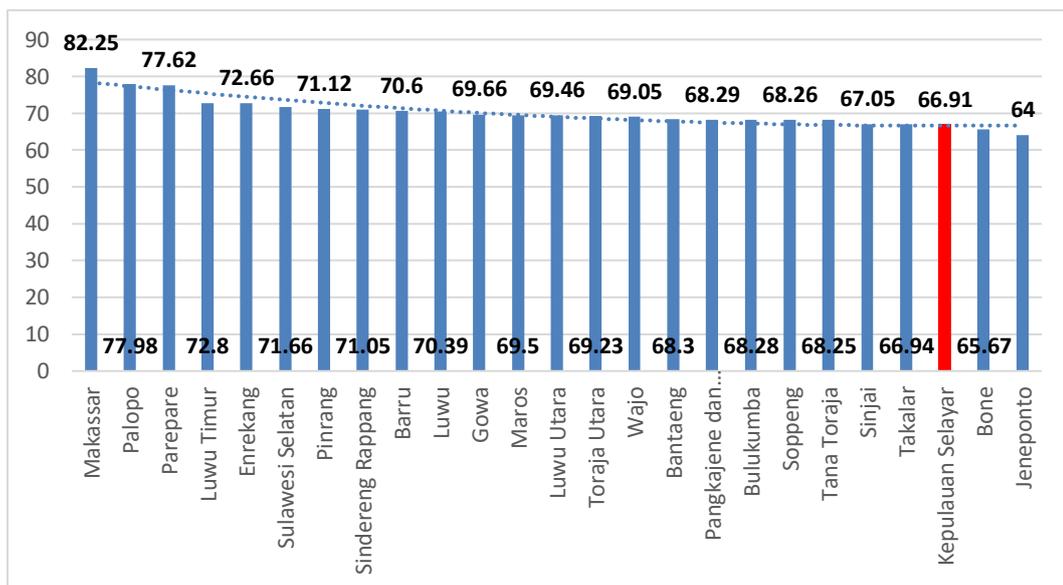
Jika dilihat pendapatan per kapita masyarakat yang merupakan cerminan dari pelaksanaan program pembangunan pemerintah di berbagai sektor pemerintahan, termasuk pada tiga sektor komposit pembentuk IPM, yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Menurut Mahendra, Fariyanti, dan Falatehan (2016) bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pendidikan. Namun yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, nilai pendapatan per kapita mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya tapi tidak diiringi dengan peningkatan indeks pendidikan yang signifikan pula atau cenderung stagnan seperti yang terlihat pada grafik di bawah :



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 5. Perbandingan pendapatan per kapita (dalam ratusan ribu) dan Indeks Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2014 – 2019

Dari grafik diatas juga dapat disimpulkan bahwa seiring dengan stagnannya pencapaian indeks pendidikan, maka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Selayar juga mengalami pencapaian yang stagnan. Bahkan, IPM Kabupaten Kepulauan Selayar berada di peringkat 22 dari 24 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang dapat dilihat pada grafik dibawah :



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 6. Capaian IPM 24 Kabupaten/ Kota di provinsi Sulsel Tahun 2019

Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah agar senantiasa melakukan berbagai upaya untuk memanfaatkan segala macam sumberdaya dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar.

Setelah melihat dan memperhatikan fenomena yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka Pemerintah Daerah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan khususnya kebijakan pada sektor pendidikan perlu mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam rangka meningkatkan Indeks Pendidikan sebagai

roda penggerak dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Beberapa faktor dimaksud dapat diidentifikasi menjadi beberapa bagian sesuai dengan komponen utama pelaksanaan serta implementasi sektor pendidikan tersebut. Beberapa komponen utama dimaksud yaitu tenaga pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana pendidikan.

Beberapa komponen utama pendidikan dimaksud dapat dinyatakan dalam beberapa variabel. Setiap variabel dapat berperan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pendidikan yang merupakan salah satu indeks komposit dari IPM. Lebih lanjut bahwa dengan peningkatan Indeks Pendidikan tentunya IPM juga akan mengalami peningkatan.

Terkait dengan variabel-variabel yang dijelaskan sebelumnya, kondisi setiap variabel dimaksud dan kontribusinya terhadap peningkatan Indeks Pendidikan tentunya berbeda-beda di setiap wilayah, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar yang wilayahnya terdiri dari wilayah daratan dan wilayah Kepulauan, dimana terdapat banyak faktor yang menyebabkan perbedaan kondisi dan kontribusi dimaksud dapat terjadi seperti faktor aksesibilitas, kualitas Sumber Daya Manusia, faktor ekonomi, sosial dan budaya, yang tentunya memiliki hubungan yang erat dengan kualitas pendidikan.

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti **“Strategi Peningkatan Indeks Pendidikan sebagai Lokomotif Pendorong Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar”** dengan

terlebih dahulu akan melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap kondisi eksisting dari beberapa indikator yang berhubungan dengan sektor pendidikan di setiap kecamatan pada wilayah daratan dan wilayah kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan kemudian mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pendidikan sebagai salah satu indeks komposit pembentuk IPM di Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Rumusan Masalah

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan yang tidak signifikan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019. Sejalan dengan hal tersebut, IPM Kabupaten Kepulauan Selayar jika dibandingkan dengan 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada peringkat ketiga terbawah. Rendahnya capaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar dimaksud sangat dipengaruhi oleh capaian indeks pendidikan yang sangat rendah jika dibandingkan dengan capaian indeks kesehatan dan indeks daya beli. Olehnya itu, berdasarkan latar belakang dimaksud, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemetaan faktor-faktor sektor pendidikan pada wilayah daratan dan wilayah kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap Indeks Pendidikan sebagai salah satu indeks komposit dari IPM di Kabupaten Kepulauan Selayar?

3. Bagaimana strategi untuk meningkatkan Indeks Pendidikan pada wilayah daratan dan wilayah kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab dan menganalisa hal-hal sebagai berikut :

1. Membuat pemetaan terhadap beberapa indikator sektor pendidikan pada wilayah daratan dan wilayah kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pendidikan sebagai salah satu indeks komposit dari IPM di Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Merumuskan strategi dalam rangka meningkatkan Indeks Pendidikan pada wilayah daratan dan wilayah kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan tentang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia khususnya pada Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Memberikan sumbangan berupa informasi terkait rumusan strategi pembangunan pendidikan serta menjadi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan arah kebijakan kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pedoman bagi anak-anak dalam kehidupannya dimana pendidikan dapat menuntun seorang anak dalam memanfaatkan segala kekuatan kodrat dan potensi dari anak dimaksud yang pada akhirnya akan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan yang maksimal baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat (Sugiarta, Mardana, Adiarta, & Artanayasa, 2019).

Sedangkan menurut Bratanata bahwa pendidikan adalah segala upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan bantuan kepada anak untuk menjadi dewasa dengan cara upaya yang sengaja untuk dilaksanakan baik itu langsung maupun tidak langsung (Abu Ahmadi & Uhbiyanti, 1991).

Maka dari beberapa pengertian pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu upaya untuk menuntun yang dilakukan oleh seseorang secara sadar dan disengaja kepada anak dalam rangka membentuk kepribadian, kedewasaan mental dan moral, intelektual serta budi pekerti yang dapat bermanfaat bagi kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat.

Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi sebagai upaya dalam rangka

memanusiakan manusia yang diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup dan latar belakang sosial setiap masyarakat tertentu (Magta M, 2013).

Oleh karena pendidikan yang menjadikan manusia sebagai sasarannya tentunya memiliki banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya diartikan sebagai proses mewariskan nilai-nilai budaya antar generasi. Sedangkan pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi diartikan sebagai suatu usaha untuk membentuk kepribadian peserta didik melalui kegiatan yang sistematis dan komprehensif (Perwira, Hasugian, & Marpaung, 2020).

2. Pendidikan sebagai Sistem

Menurut Tirtarahardja dan La Sulo (2008), Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen, yaitu :

1. Sistem baru merupakan masukan mentah (*raw input*) yang akan diproses menjadi tamatan (*output*)
2. Guru dan tenaga non guru, administrasi sekolah, kurikulum, anggaran pendidikan, prasarana dan sarana merupakan masukan instrumental (*instrumental input*) yang memungkinkan dilaksanakannya pemrosesan masukan mentah menjadi tamatan
3. Corak budaya dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar, kependudukan, politik dan keamanan negara merupakan faktor lingkungan atau masukan lingkungan (*environmental input*) yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap berperannya masukan instrumental dalam pemrosesan masukan mentah.

Menurut UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan formal wajib diikuti oleh setiap warga negara minimal sampai tamat SMP. Bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti ataupun menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal maka disediakan pendidikan non-formal, untuk memperoleh bekal guna terjun ke masyarakat. Perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang kian mengalami perkembangan menyebabkan kualitas pendidikan non-formal (PNF) sebagai mitra pendidikan formal (PF) juga semakin berkembang (Tirtarahardja & La Sulo, 2008).

Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan proses pendidikan dalam menghasilkan manusia yang berkualitas sangat bergantung pada peran dari masing-masing jenis pendidikan yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal sehingga ketiga subsistem pendidikan dimaksud hanya dapat dibedakan tetapi sulit untuk dipisahkan (Tirtarahardja & La Sulo, 2008)

3. Tingkatan Pendidikan

Tingkatan pendidikan adalah ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan (Ihsan, 2013). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003 dalam pendidikan formal, ada tiga tingkatan pendidikan sekolah yaitu sebagai berikut :

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang akan menjadi landasan bagi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

b. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum yang akan mempersiapkan para peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi serta pendidikan menengah kejuruan yang akan mempersiapkan peserta didik berkontribusi dalam dunia kerja. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan tinggi yang bersifat akademik dan atau profesional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

B. Indikator Pendidikan

Menurut Chamadi (Sukarsa, 2012), untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu daerah, dipergunakan beberapa indikator, yaitu :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah penduduk menurut kelompok usia sekolah yang sesuai dikalikan 100 persen;
2. Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu dengan jumlah penduduk menurut kelompok usia yang sama dikalikan 100 persen;
3. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) yaitu perbandingan antara jumlah penduduk menurut usia sekolah dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai;
4. Angka Melanjutkan (AMI) yaitu perbandingan antara jumlah murid baru suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah lulusan dari jenjang pendidikan satu tingkat dibawahnya dikalikan 100 persen;
5. Angka Putus Sekolah (APS) yaitu perbandingan antara jumlah murid yang keluar dari sistem pendidikan sebelum lulus selama satu tahun pengajaran tanpa ada surat keterangan pindah dari kepala sekolah dengan jumlah murid seluruhnya dikalikan 100 persen;

6. Angka Mengulang (AU) yaitu perbandingan antara jumlah murid yang mengulang dengan jumlah seluruh murid tahun sebelum pada jenjang pendidikan tertentu dikalikan 100 persen;
7. Angka Lulusan (AL) yaitu perbandingan antara jumlah murid yang berhasil menyelesaikan pendidikan untuk suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah murid tingkat terakhir pada tahun sebelumnya dikalikan 100 persen;
8. Rasio *Input/Output* (RIO) yaitu perbandingan antara jumlah lulusan tahun tertentu dengan murid baru tingkat I (tahun pertama memasuki proses pendidikan) pada jenjang pendidikan tertentu dikalikan 100 persen;
9. Rasio Guru dan Siswa (RGS) yaitu perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu;
10. Rasio sekolah dan siswa (RSKS) yaitu perbandingan antara jumlah jumlah sekolah dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu;
11. Rasio kelas dan siswa (RKS) yaitu perbandingan antara jumlah kelas dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu;
12. Rasio Kelas dan Ruang Kelas (RKRK) yaitu perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan tertentu;
13. Persentase Ruang Kelas Baik (PRKB) yaitu perbandingan antara jumlah ruang kelas milik yang berkondisi baik dengan seluruh jumlah ruang kelas milik pada jenjang pendidikan tertentu; dan

14. Persentase Guru Layak Mengajar (PGLM) yaitu perbandingan antara jumlah guru yang memiliki tingkat pendidikan yang sesuai untuk mengajar bidang studi tertentu pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah guru seluruhnya dikalikan 100 persen.

C. Program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bidang Pendidikan

Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan urusan wajib pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai dengan yang termuat pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2021, maka tujuan dan sasaran serta strategi bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Dalam mencapai Visi dan Misi yang diharapkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka dapat diformulasikan dalam beberapa tujuan sebagai berikut :

- a. Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah yang berorientasi pada pembentukan karakter
- b. Menjaga seluruh nilai-nilai kebudayaan daerah dapat diapresiasi dan dikembangkan dalam kehidupan Peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru
- c. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan pendidikan

- d. Tersedianya layanan pendidikan non formal dalam bentuk pendidikan kesetaraan dan keaksaraan fungsional bagi warga yang tidak terjangkau pendidikan formal dan masih buta aksara
- e. Meningkatkan akses pendidikan bermutu yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat
- f. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja dengan melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan
- g. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan memadai
- h. Memperdalam wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai kesenian dan kebudayaan daerah dan nasional

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan, adalah:

- a. Meningkatnya mutu lulusan dan kualitas pendidikan
- b. Pembentukan sekolah unggulan bagi setiap jenis, satuan dan jenjang pendidikan di tingkat Kabupaten
- c. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
- d. Peningkatan pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi
- e. Penataan dan pemerataan guru profesional
- f. Peningkatan penegakan disiplin guru
- g. Meningkatnya akses dan layanan pendidikan yang berkualitas
- h. Meningkatnya angka partisipasi bagi anak usia sekolah
- i. Meningkatnya angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas

- j. Meningkatnya subsidi pendidikan bagi masyarakat tidak mampu
- k. Terwujudnya system pelaporan dan kinerja instansi pemerintah
- l. Meningkatnya pemanfaatan system pembinaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel
- m. Meningkatnya pemanfaatan system pengelolaan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN)
- n. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang pendidikan
- o. Pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan, sehingsehari-hari masyarakat

3. Sasaran Strategis Pelaksanaan urusan Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar

- a. Meningkatnya Mutu Lulusan dan Kualitas Pendidikan
- b. Pembentukan sekolah unggulan bagi setiap jenis, satuan dan jenjang pendidikan di tingkat kabupaten
- c. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
- d. Peningkatan pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi
- e. Penataan dan pemerataan guru professional
- f. Peningkatan penegakan disiplin guru
- g. Meningkatnya akses dan layanan pendidikan yang berkualitas
- h. Meningkatnya angka partisipasi bagi anak usia sekolah
- i. Terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah
- j. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang pendidikan

- k. Pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan, sehingga seluruh nilai-nilai kebudayaan daerah dapat diapresiasi dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat

Untuk merealisasikan beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, menuangkan kebijakan dalam beberapa program pembangunan yang termuat pada dokumen APBD Kabupaten Kepulauan Selayar. Beberapa program tersebut antara lain :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun
3. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Program Peningkatan Mutu Pendidikan

D. Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan. Ada 6 prinsip dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yang telah ditetapkan yaitu

- a. Prinsip kesesuaian kewenangan yaitu penerapa SPM disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah baik itu provinsi ataupun Kabupaten/Kota menurut pembagian urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar.
- b. Prinsip ketersediaan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal
- c. Prinsip keterjangkauan dalam rangka dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap Warga Negara
- d. Prinsip kesinambungan dalam rangka menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan
- e. Prinsip keterukuran dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga negara melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang terukur.
- f. Prinsip ketepatan sasaran dalam rangka pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal kepada setiap warga negara dengan memprioritaskan masyarakat miskin dan tidak mampu.

Setiap SPM di berbagai sektor terkhusus sektor pendidikan, tentunya memiliki indikator pencapaian. Indikator pencapaian SPM yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Indikator SPM bidang Pendidikan

No. IP	Indikator Standar Pelayanan Minimal:
A. Pencapaian Pelayanan Pendidikan Dasar Pada Tingkat Kabupaten Kota	
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil
2.1	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang.
2.2	Untuk setiap rombongan belajar SD/MI tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.
2.3	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.
2.4	Untuk setiap rombongan belajar SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.
3.1	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik.
3.2	Di setiap SMP dan MTs tersedia minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.
4.1	Di setiap SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.
4.2	Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.
4.3	Di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.
5.1	Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.
5.2	Di setiap SD/MI memiliki 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.
6	Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.
7.1	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV.
7.2	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

8.1	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% atau lebih (untuk daerah khusus sebanyak 40% atau lebih).
8.2	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 35% atau lebih (untuk daerah khusus 20% atau lebih) dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik.
9	Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
11	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
12	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
13	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

B. Pencapaian Pelayanan Pendidikan Dasar Pada Tingkat Satuan Pendidikan

No. IP	Indikator Standar Pelayanan Minimal:
15	Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bhs. Indonesia, IPA, IPS dan Pkn dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik.
16	Setiap SMP dan MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik.
17	Setiap SD dan MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, KIT IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA
18.1	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi
18.2	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi

19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan.
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :
	Kelas 1-2 : 18 Jam per minggu
	Kelas 3 : 24 Jam per minggu
	Kelas 4-6 : 27 Jam per minggu
	Kelas 7-9 : 27 Jam per minggu
21	Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku
22	Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali setiap semester
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil belajar
26	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK serta Ujian Akhir (US/UN).
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar

E. Pembangunan Manusia

Indikator Pembangunan Manusia dapat diidentifikasi dan diinventarisasi berdasarkan definisi dari pembangunan manusia itu sendiri (Azahari, 2000). Dalam hal ini, definisi pembangunan manusia dapat merujuk pada terminologi yang beragam. Pembangunan manusia adalah sebuah proses dalam rangka meningkatkan kebebasan dan peluang

seseorang serta meningkatkan kesejahteraan mereka, memungkinkan mereka menjalani hidup yang panjang dan sehat; untuk memiliki akses ke pengetahuan; untuk menikmati standar hidup yang layak; dan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi mereka (Khodabakhshi, 2011). Menurut Gilley dan Egglan menyatakan bahwa *human development* merujuk kepada kemajuan pengetahuan, kompetensi dan perbaikan perilaku-perilaku sumberdaya manusia itu sendiri, baik untuk kepentingan individual maupun untuk kepentingan organisasi (Azahari, 2000). Sedangkan menurut Radovanovic (2011) bahwa pembangunan manusia tentang merealisasikan potensi, menciptakan dan meningkatkan pilihan, dan selanjutnya menikmati kebebasan dalam menjalankan kehidupan yang diinginkan dan dihargai.

Dalam cakupan yang lebih luas, *United Nations Development Programme* (UNDP) berpendapat bahwa *human development* merujuk kepada proses “perluasan pilihan bagi masyarakat”. Perluasan ini meliputi pilihan-pilihan yang memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih lama dan lebih sehat, lebih berpendidikan dan memiliki standar kehidupan ekonomi yang lebih baik. Berkaitan dengan hal ini pula, PBB lebih menetapkan tiga target pembangunan yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh bangsa-bangsa di dunia. Dalam laporannya, World Bank menyatakan bahwa pembangunan memiliki tiga target yang harus dicapai yaitu perbaikan ekonomi dan kesejahteraan, pembangunan sosial dan perbaikan lingkungan yang berkelanjutan (Azahari, 2000).

Lebih lanjut menurut Azahari (2000) bahwa beberapa target dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan manusia yaitu pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan ternyata belum mampu untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan padahal masalah-masalah seperti ini sangat perlu upaya penanganan sesegera mungkin. Olehnya itu diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan peluang kerja dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka menyelesaikan permasalahan dimaksud dan salah satu jawabannya adalah investasi di bidang pendidikan. Investasi di bidang pendidikan akan meningkatkan kualitas pembangunan manusia di suatu daerah.

Lebih lanjut bahwa dalam rangka mengukur dan menilai tingkat dan kualitas pembangunan manusia dan membandingkan capaian pembangunan manusia suatu daerah dengan daerah lain serta mengevaluasi kebijakan pembangunan manusia yang telah dilakukan, maka pemerintah perlu untuk merumuskan indikator yang tepat. Olehnya itu Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan untuk mencapai tujuan dimaksud (Radovanovic, 2011).

F. Indeks Pembangunan Manusia

Peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi adalah dua tujuan utama dari negara-negara demokrasi pada umumnya. Olehnya itu, untuk mengevaluasi pencapaian dari kebijakan yang telah diimplementasikan diperlukan variabel yang memiliki indikator

multidimensional yang lebih akurat dari Produk Domestik Bruto (PDB) (Herrero, Martínez, & Villar, 2012).

Menurut UI Haq, Indeks Pembangunan Manusia dirumuskan oleh *United National Development Programme* (UNDP) pada tahun 1984 pada saat persiapan penyusunan Laporan Pembangunan Manusia. Tujuan dari pengenalan IPM yaitu menawarkan sebuah indikator alternatif terkait pengukuran kesejahteraan suatu negara selain PDB (Radovanovic, 2011). Menurut Raworth dan Stewart bahwa pembangunan manusia adalah indikator yang dapat mencerminkan dampak kebijakan publik (Radovanovic, 2011). IPM dibuat untuk menekankan bahwa perkembangan suatu negara harus diukur dari kualitas dan kemampuan manusia dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak (Radovanovic, 2011).

Menurut Hasan bahwa salah satu faktor yang dapat mempercepat peningkatan IPM adalah peningkatan pendapatan per kapita. Peningkatan dimaksud akan meningkatkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Namun, tingginya pertumbuhan sektor di daerah belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan dan tidak diikuti dengan peningkatan distribusi pendapatan bagi seluruh masyarakat (Arisman, 2018). Olehnya itu, pengukuran terhadap kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan dari tiap manusia perlu untuk dilakukan.

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang dapat diatasi terlebih lagi permasalahan yang

paling mendasar. Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pada pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang (Harliyani & Haryadi, 2016). Oleh karena itu pemerintah memegang peranan penting dalam menjalankan proses pembangunan dalam rangka melakukan perubahan kearah yang lebih baik (Baeti, 2013).

Permasalahan yang paling mendasar dalam pembangunan ini berada dalam peningkatan kemampuan dasar masyarakat baik secara fisik maupun non fisik (mental dan spiritual). Dalam hal ini pembangunan manusia menitikberatkan peningkatan kualitas hidup yang dilihat dari tiga aspek, yaitu: aspek kesehatan, yang diukur berdasarkan besar-kecilnya angka harapan hidup saat lahir, aspek Pendidikan yang diukur berdasarkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan aspek daya beli yang diukur berdasarkan nilai pengeluaran per kapita

Menurut Badan Pusat Statistik, ada 3 manfaat Indeks Pembangunan Manusia. Pertama, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Kedua, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Ketiga, Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Lebih lanjut menurut BPS, sejak tahun 2010, UNDP memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru dan pada tahun

2011 dan 2014 dilakukan penyempurnaan metodologi. Pada penghitungan IPM metode baru dimaksud, variabel Angka Melek Huruf digantikan dengan Angka Harapan Lama Sekolah serta Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Keunggulan dari IPM metode baru ini antara lain :

- a. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).
 - Dengan memasukkan Rata-rata Lama Sekolah dan angka Harapan Lama Sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
 - PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- b. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya

Tabel 2. Perbandingan IPM Metode Baru dan Metode Lama

Dimensi	Metode Lama		Metode Baru	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka Harapan Hidup (AHH)
Pendidikan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)

Dimensi	Metode Lama		Metode Baru	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Standar Hidup Layak	PDB per kapita	Pengeluaran per kapita	PNB per kapita	Pengeluaran per kapita
Agregasi	Rata-rata hitung		Rata-rata ukur	
	$IPM = \frac{1}{3}(I \text{ kesehatan} + I \text{ pendidikan} + I \text{ pendapatan})$		$IPM = \sqrt[3]{I \text{ kesehatan} \times I \text{ pendidikan} \times I \text{ pendapatan}}$	

Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut BPS, penghitungan komponen Indeks Pembangunan

Manusia sebagai berikut :

1) Dimensi Kesehatan :

$$I \text{ kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

2) Dimensi Pendidikan

$$I \text{ pendidikan} = \frac{I \text{ HLS} + I \text{ RLS}}{2}$$

dengan :

$$I \text{ HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I \text{ RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

3) Dimensi Standar Hidup

$$I \text{ pendapatan} = \frac{\ln(\text{pendapatan}) - \ln(\text{pendapatan})_{min}}{\ln(\text{pendapatan})_{maks} - \ln(\text{pendapatan})_{min}}$$

Penentuan nilai maksimum dan nilai minimum untuk perhitungan

diasas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Penentuan nilai maksimum dan minimum penghitungan IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Pengeluaran per kapita disesuaikan		100 (PPP U\$)	1.007.436 (Rp)	107.721 (PPP U\$)	26.572.352 (Rp)

Sumber : Badan Pusat Statistik

Sebagaimana diketahui bahwa seluruh kabupaten/kota di Republik Indonesia memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang sangat beragam. Olehnya itu, untuk mengetahui kualitas pembangunan manusia di suatu daerah berdasarkan capaian IPM, maka diperlukan klasifikasi IPM ke dalam beberapa kategori atau golongan. Menurut Badan Pusat Statistik, IPM dibagi menjadi 4 kategori yaitu IPM kategori rendah jika capaiannya < 60 , IPM kategori sedang jika capaiannya $60 \leq IPM < 70$, IPM kategori tinggi jika capaiannya $70 \leq IPM < 80$ serta IPM kategori sangat tinggi jika capaiannya ≥ 80 (Darsyah, 2014).

G. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan salah satu dari tiga komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pendidikan digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan sebagai salah satu variabel pembangunan manusia. Menurut BPS, Indeks Pendidikan merupakan penggabungan dua indikator pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah (Mahendra et al., 2016).

Angka rata-rata lama sekolah digambarkan sebagai jumlah tahun yang diperlukan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal, sedangkan harapan lama sekolah digambarkan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (Mahendra et al., 2016).

Sebagai salah satu dari indeks komposit dari IPM, maka Indeks Pendidikan sangat berpengaruh pada IPM itu sendiri. Peningkatan Indeks Pendidikan berkorelasi positif dan signifikan dengan peningkatan IPM (Cahill, 2014). Indeks Pendidikan juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM (Lestari & Sanar, 2018).

H. Manajemen Strategis

Dalam rangka mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati, maka suatu organisasi/institusi harus melakukan berbagai cara dan pengetahuan dalam rangka merumuskan dan mengimplementasikan suatu kebijakan serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan dimaksud, baik itu kebijakan masing-masing fungsi ataupun kebijakan lintas fungsi pada organisasi dimaksud. Hal inilah yang dimaksud dengan manajemen strategis. Manajemen strategis berfokus pada mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi (David, 2009).

Lebih lanjut menurut David (2009), proses manajemen strategis adalah rangkaian dalam penyusunan strategi untuk menentukan tujuan dan sasaran serta menyusun strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Perumusan strategi yang dimulai dari merumuskan Visi dan Misi, menetapkan tujuan dan sasaran jangka panjang, mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh pada organisasi dan kemudian merumuskan beberapa alternatif strategi serta

menganalisis dan memilih strategi yang paling tepat untuk mencapai visi dan misi dimaksud.

2. Implementasi strategi dimulai dari menetapkan tujuan jangka pendek dalam periode satu tahun, merumuskan arah kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan berbagai sumberdaya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dijalankan. Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi.
3. Evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen strategis. Tiga tahap aktivitas dasar evaluasi strategi yaitu meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi, melakukan pengukuran kinerja, dan selanjutnya melakukan tindakan perbaikan terhadap kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan strategi dimaksud.

I. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pada kajian terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia, maka ada beberapa faktor-faktor sektor pendidikan yang berpengaruh terhadap peningkatan IPM dimaksud. Menurut Sangkereng, Engka, and Sumual (2020) menunjukkan bahwa jumlah guru dan siswa serta rasio guru terhadap siswa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi

Sulawesi Utara. Selanjutnya menurut Latuconsina (2017) bahwa pada wilayah yang berciri peri-urban di Kabupaten Malang, faktor rasio sekolah terhadap siswa tingkat SD berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM. Lebih lanjut menurut Mahendra, Fariyanti, and Falatehan (2016) bahwa salah satu faktor yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Indeks Pendidikan di Provinsi Jawa Timur adalah rasio guru terhadap siswa tingkat SD. Sejalan dengan hal itu, menurut kajian yang dilakukan oleh Destilluna and Zain (2015) bahwa Rasio siswa terhadap guru tingkat SMP juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM Provinsi Jawa Timur. Lebih lanjut menurut Melliana and Zain (2013), bahwa rasio siswa terhadap guru berpengaruh signifikan terhadap IPM. Namun, variabel rasio sekolah terhadap siswa tingkat SMP tidak berpengaruh terhadap IPM. Selanjutnya, menurut Cahyadi (Bandiyono, 2018) bahwa rasio jumlah murid SD terhadap jumlah ruangan kelas SD pada kabupaten/kota di Provinsi Bali berpengaruh positif terhadap IPM dan menurut Sugiarto & Kurniawan (2015) bahwa Rasio Kelas terhadap Siswa tingkat SMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pendidikan.

Selain itu terkait dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang merumuskan beberapa strategi yang berkaitan dengan sektor pendidikan untuk meningkatkan IPM. Menurut Fransisco, Firdaus, and Mulatsih (2019) bahwa strategi untuk meningkatkan IPM di bidang pendidikan adalah peningkatan kompetensi dan pelayanan dari tenaga pendidik. Lebih lanjut menurut Mahendra, Fariyanti, and Falatehan (2016) bahwa Strategi untuk meningkatkan indeks pendidikan di Jawa Timur

melalui alokasi belanja pemerintah daerah bidang pendidikan berdasarkan metode AHP, prioritas pertama yaitu pemerataan kuantitas tenaga pendidik. Prioritas strategi berikutnya adalah beasiswa kurang mampu. Prioritas ketiga dan seterusnya adalah rehabilitasi ruang kelas, penambahan jumlah sekolah formal & nonformal, diklat/workshop untuk tenaga pendidik, serta bantuan biaya operasional pada sekolah nonformal. Selanjutnya menurut Yanuarta (2009) bahwa beberapa strategi dan prioritas pembangunan sektor pendidikan untuk meningkatkan IPM adalah program sekolah gratis, dan program lainnya adalah rehabilitasi sekolah, peningkatan kompetensi guru, pengadaan sarana pendidikan, pembentukan PKBM, pembangunan sekolah, peningkatan insentif guru, dan pendidikan D2 bagi guru. Selanjutnya menurut Ekosiswoyo, Kardoyo, and Raharjo (2010) menyatakan bahwa Strategi Akselerasi Pencapaian IPM Bidang Pendidikan di kota Semarang, yaitu Pemerataan dan perluasan akses, Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, Penguatan tata kelola akuntabilitas dan pencitraan publik.

J. Hipotesis Penelitian

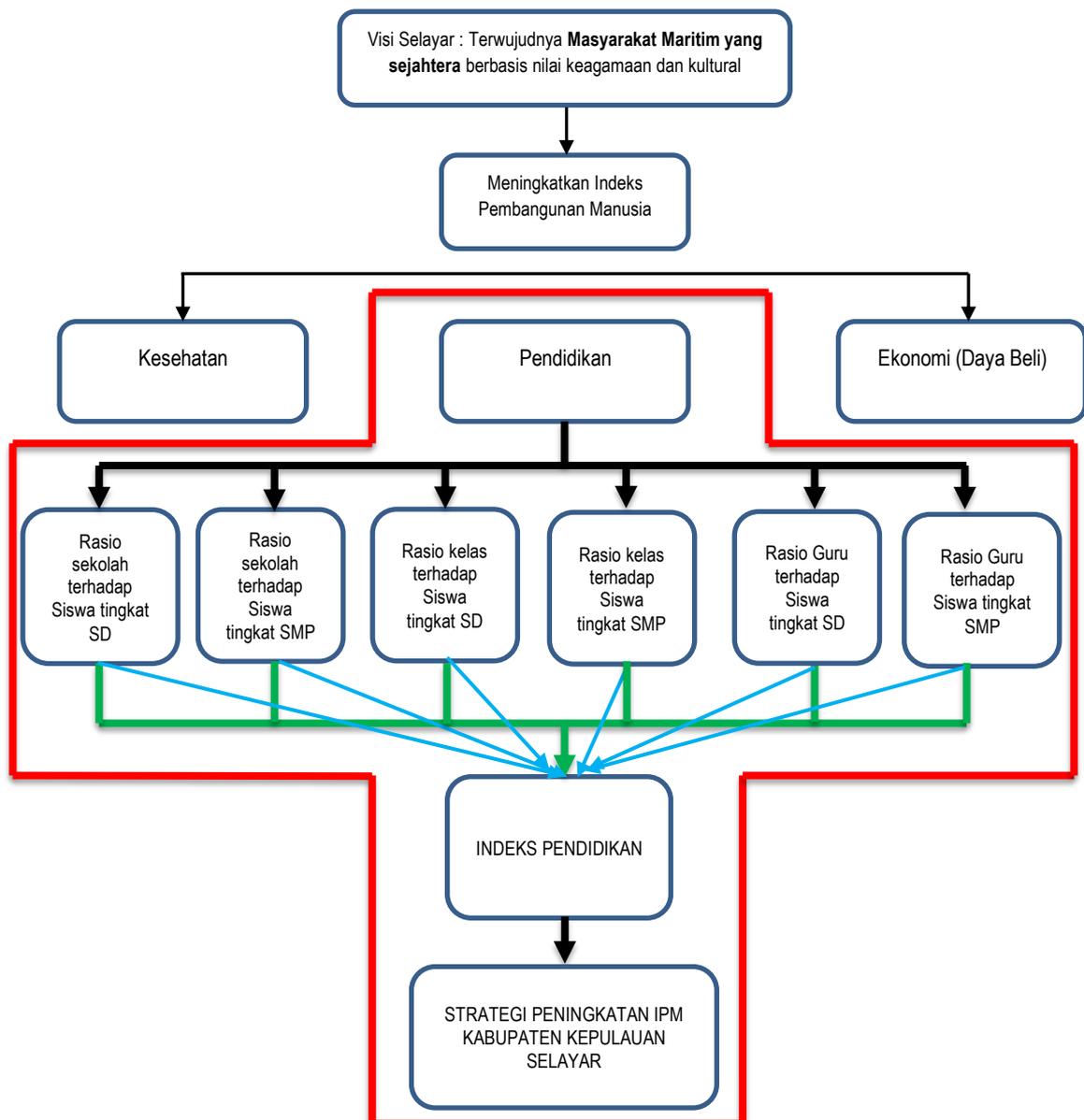
Perumusan Hipotesis pada penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah serta berdasarkan kajian dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya. Hipotesis penelitian yang dirumuskan dapat dijelaskan sebagai berikut :

“ Variabel Rasio sekolah terhadap Siswa tingkat SD, Rasio sekolah terhadap Siswa tingkat SMP, Rasio Guru terhadap Siswa tingkat SD, Rasio Guru terhadap Siswa tingkat SMP, Rasio kelas terhadap Siswa tingkat SD,

Rasio kelas terhadap Siswa tingkat SMP masing-masing dan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar”.

K. Kerangka Konseptual

Secara umum kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



KET : = Lingkup Penelitian

→ = Pengaruh masing-masing variabel dependen terhadap variabel independen

→ = Pengaruh variabel dependen secara simultan terhadap variabel independen